

Pendidikan Politik Bagi Calon Legislatif Perempuan Di Provinsi Banten (Studi Pada Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Masyarakat Desa Provinsi Banten)

Luis Fiska Rahayu

luis.fiska.rahayu@binabangsa.ac.id

Universitas Bina Bangsa

Article Info

Article history:

Received: 1 Januari 2023

Publish: 31 Januari 2023

Keywords:

Female candidate

Political Education

BPPMD Prov. Banten

Info Artikel

Article history:

Diterima: 1 Januari 2023

Publis: 31 Januari 2023

Abstract

The objectives of conducting this research were: first, to understand and analyze the operation of the Coordination, Advocacy, Facilitation, Outreach, and Evaluation mechanisms carried out by BPPMD for women candidates; second, to discuss and analyze the extent of the efforts that have been made by BPPMD in carrying out its efforts, especially those concerning political education for female candidates in Banten Province. The theory used by researchers in conducting this research is the Theory of Political Education Institutions, while the research method used is a qualitative method with a descriptive analysis approach. The use of this qualitative method is because this method has advantages in understanding a phenomenon about what is experienced by research subjects such as behavior, perception, motivation, action holistically. Political education carried out by BPPMD, especially in the field of improving the Quality of Life for Women (PKHP) consists of breakthrough actions which include aspects of Coordination, Advocacy, Facilitation, Socialization and Evaluation which are abbreviated as KAFSE. Through this breakthrough action, BPPMD aspires to be able to improve the quality of female candidates in Banten Province. Based on the results of the research that has been done, the researcher concludes that improving the quality of female candidates is not an easy job and can be done in a short time, but is a long and continuous process. Even this effort is the responsibility of all parties, both the Government, Political Parties, Non-Governmental Organizations (NGOs), Religious and Community Organizations. BPPMD is making every effort so that there are funds from the State Budget that are allocated to improve the quality of life of women (Gender budgeting). However, it must be realized that there are still limitations in various ways, so that to achieve optimal results in accordance with the available facilities, infrastructure, and costs, even to achieve measurable targets and goals is very difficult to do.

Abstrak

Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah: pertama, untuk memahami dan menganalisa jalannya mekanisme Koordinasi, Advokasi, Fasilitasi, Sosialisasi, dan Evaluasi yang dilakukan oleh BPPMD bagi caleg perempuan; kedua, untuk membahas dan menganalisa sejauh mana upaya-upaya yang telah dilakukan oleh BPPMD dalam menjalankan upaya-upayanya, khususnya yang menyangkut pendidikan politik bagi caleg perempuan di Provinsi Banten. Adapun teori yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah Teori Lembaga Pendidikan Politik, sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Penggunaan metode kualitatif ini dikarenakan metode ini memiliki kelebihan dalam memahami suatu fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik. Pendidikan politik yang dilakukan oleh BPPMD, khususnya bidang peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP) terdiri dari aksi terobosan yang meliputi aspek Koordinasi, Advokasi, Fasilitasi, Sosialisasi dan Evaluasi yang disingkat menjadi KAFSE. Melalui aksi terobosan ini BPPMD bercita-cita dapat meningkatkan kualitas caleg perempuan di Provinsi Banten. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti berkesimpulan bahwa peningkatan kualitas caleg perempuan bukanlah pekerjaan yang mudah dan dapat dilakukan dalam waktu yang singkat, akan tetapi merupakan proses yang panjang dan berkelanjutan. Upaya inipun menjadi tanggung jawab semua pihak, baik Pemerintah, Partai Politik, Lembaga Swadaya Pemerintah (LSM), Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan. BPPMD sangat mengupayakan agar terdapat dana dari Anggaran Belanja Negara yang dialokasikan untuk peningkatan kualitas hidup perempuan (Gender budgeting). Namun demikian, tetap haruslah disadari bahwa masih adanya keterbatasan dalam berbagai hal, sehingga untuk mencapai hasil yang optimal sesuai dengan sarana, prasarana, dan biaya yang tersedia bahkan untuk mencapai target dan sasaran yang terukur sangatlah sulit untuk dilakukan.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Luis Fiska Rahayu
Universitas Bina Bangsa
Email : luis.fiska.rahayu@binabangsa.ac.id

1. PENDAHULUAN

Fenomena yang terjadi sekarang ini adalah *euphoria* untuk menjadi anggota legislatif sangat tinggi. Tidak hanya laki-laki tetapi juga perempuan ingin ikut terlibat dalam proses demokrasi ini. Sebagaimana diketahui bahwa tugas pokok dan fungsi DPR adalah pengawasan, legislasi, menerima aspirasi dan Penganggaran. Dan tugas dan fungsi tersebut cukup berat, sehingga para caleg dituntut untuk mempersiapkan diri dengan serius agar peranan mereka nanti dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi rakyat.

Berdasarkan UU.10 tahun 2008 pada pasal 50, salah satu persyaratan bakal calon anggota DPR RI, DPR Provinsi, dan DPRD Kab/Kota adalah cakap berbicara, membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia, itu artinya dibutuhkan wawasan pengetahuan, dan keterampilan bagi calon legislatif untuk menunjang tugas-tugasnya setelah terpilih nantinya.

Pendidikan politik bagi caleg perempuan merupakan suatu ketertarikan penulis sebagai urgency atas ketertinggalan perempuan dalam memahami politik dan keterlibatan perempuan di posisi legislasi. Untuk menjamin persamaan akses dan partisipasi perempuan pada struktur kekuasaan dan pengambilan keputusan dibutuhkan peningkatan kualitas caleg perempuan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh OPD Deputi bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Kementrian Pemberdayaan Perempuan (KNPP) pada tahun 2007, bahwa berdasarkan pengalaman dan hasil yang dicapai pada PEMILU 2004 perempuan di Parlemen ternyata tidak menunjukkan perubahan yang berarti karena kualitasnya yang tidak memadai dan ketidakmampuannya merespon aspirasi masyarakat.

Provinsi banten merupakan provinsi di Indonesia yang memiliki fenomena kesetaraan gender yang masih perlu diupayakan peningkatannya. Hal ini disebabkan oleh kondisi perempuannya yang masih memprihatinkan. Baik berdasarkan faktor kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan maupun kecilnya jumlah perempuan yang berada di Legislatif, Yudikatif dan Eksekutif.

Dengan keterwakilan perempuan di Legislatif minimal 30% diharapkan akan terjadi keseimbangan dalam proses pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan publik, agar aspirasi, dan kepentingan perempuan. Terakomodasi dalam Undang-Undang Peraturan Daerah dan diharapkan akan muncul “wajah-wajah baru” di Provinsi Banten.

Sepak terjang perempuan dalam dunia politik adalah suatu hal yang wajar sebagaimana tercantum dalam pasal 27 UUD 1945 yang secara eksplisit mengaskan bahwa tidak ada perbedaan hak antara laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan baik dari segi Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Politik, dan Undang-Undang Kepegawaian. Sehingga pada dasarnya perempuan mendapatkan kesempatan yang sama dalam berpolitik tidak diskriminatif.

Semua penduduk Provinsi Banten memperoleh hak dan kewajiban yang sama dalam segala aspek kehidupan. Program Pembangunan Daerah Provinsi Banten dirancang dan dilaksanakan untuk memberi akses, partisipasi, manfaat dan kontrol bagi semua penduduk laki-laki dan perempuan. Tetapi data yang diperoleh survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Banten menunjukkan bahwa kaum perempuan di Provinsi Banten masih tertinggal.

Berdasarkan UU. 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang diwadahi dalam bentuk badan, kantor, inspektorat, dan rumah sakit, maka Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa dibentuk karena masalah pemberdayaan perempuan sudah menjadi urusan wajib semua pihak. Oleh sebab itu adalah wajib bagi semua Provinsi Kabupaten, Kota, untuk membentuk Badan yang mengurus Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa (BPPMD) Provinsi Banten merupakan Badan Pemerintah yang dibentuk melalui perda no.4 th 2008 dan berdasarkan UU.41/2007 BPPMD peduli pada pemberdayaan perempuan di bidang Ekonomi, Pendidikan, Politik, Sosial, Budaya dan Lingkungan. BPPMD memberikan aksi-aksi terobosan berupa

Koordinasi, Advokasi, Fasilitasi, Sosialisasi dan Evaluasi bagi perempuan di bidang ekonomi, pendidikan, politik, sosial, budaya dan lingkungan. Tentu saja langkah pemerintah ini sangat membantu perempuan-perempuan yang ingin mendapatkan **Koordinasi, Advokasi, Fasilitasi, Sosialisasi dan Evaluasi** dari BPPMD.

Dari pernyataan di atas, peneliti ingin mengemukakan bahwa pada dasarnya pendidikan politik bagi caleg perempuan itu tidak semata sebagai kesadaran bela Negara, tetapi pendidikan dalam konteks *nature* mereka. Perempuan masih melihat politik sebagai sesuatu yang asing. Padahal politik adalah tindakan keseharian semua orang. Ketika timbul pertanyaan “ mengapa harga bahan bakar terus naik?” sebenarnya pertanyaan tersebut adalah sebenarnya kegiatan berfikir politis. Dengan demikian caleg perempuan harus diberi pengertian bahwa politik adalah kebutuhan sehari-hari perempuan dan alat untuk perempuan untuk mencapai kesejahteraan semua orang tidak hanya bagi perempuan saja.

Pendidikan Politik dalam terminologi ilmu politik dan sosiologi politik menurut Kartono (1999:57) dikenal sebagai political forming atau politische Bildung. Disebut forming karena terkandung intensi membentuk insan politik yang menyadari kedudukan politiknya di tengah masyarakat. Disebut bildung (pembentukan atau pendidikan diri sendiri), karena istilah tersebut mengandung makna pembentukan diri sendiri dengan kesadaran dan tanggung jawab sendiri menjadi insan politik.

Lebih lanjut Kartono mengungkapkan bahwasanya pendidikan politik ini merupakan bentuk pendidikan orang dewasa dengan jalan menyiapkan kader-kader untuk pertarungan politik dan mendapatkan penyelesaian politik agar menang dalam perjuangan politik. Karena itu, pendidikan politik merupakan upaya pendidikan yang disengaja dan sistematis untuk membentuk individu agar menjadi partisipan yang bertanggung jawab secara etis atau moral dalam mencapai tujuan-tujuan politik. Keseluruhan aktifitas pendidikan politik ini sekaligus merupakan usaha membangun demokrasi kearah yang dicita-citakan.

Hajer (1972:214) menyebutkan bahwa pendidikan politik adalah usaha membentuk manusia menjadi partisipan yang bertanggung jawab dalam politik dan masyarakat yang mengerti tentang hak politiknya. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, BPPMD dalam setiap seminar-seminarnya sangat menghimbau kepada caleg-caleg perempuan untuk mengerti hak politiknya dan sadar akan kedudukan politiknya.

Kartono (1999:13) menyebutkan bahwa pendidikan politik adalah bentuk pendidikan orang dewasa dengan jalan menyiapkan kader-kader untuk pertarungan politik dan mendapatkan penyelesaian politik, agar menang dalam perjuangan politik. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, maka BPPMD memberikan seminar-seminar yang memfokuskan pada meningkatkan wawasan caleg perempuan sebagai kiat-kiat untuk memenangkan pemilu.

Kartono juga menyebutkan bahwa pendidikan politik merupakan upaya pendidikan yang disengaja dan sistematis untuk membentuk individu agar mampu menjadi partisipan yang bertanggung jawab secara etis dan moral dalam mencapai tujuan-tujuan politik. Selaras dengan teori ini, sudah menjadi tugas pokok BPPMD dalam seminar-seminarnya selalu mengingatkan pada caleg-caleg perempuan untuk berkompetisi secara sehat.

Giasecke (1971:21) memberikan batasan tentang pendidikan politik yaitu berupa:

- a. *Bildungswissen* yaitu bisa mengetahui bentuk dan gambaran dari manusia (*Mensbeeld*) serta perkembangannya, dan gambaran kebudayaan bangsa sendiri. Maka BPPMD memiliki cita-cita agar caleg-caleg perempuan ini memahami benar pandangan hidup, kearifan lokal masyarakat yang diwakilinya, yaitu masyarakat Banten. Ini dikarenakan karena masih banyak caleg perempuan yang belum memahami benar pandangan hidup atau kearifan lokal masyarakat Banten.
- b. *Orientierungswissen* yaitu mampu berorientasi pada paham kemanusiaan yang bisa memberikan kebahagiaan, keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan pada setiap warga Negara dan umat manusia. Harapan bagi BPPMD adalah agar caleg-caleg perempuan ini dapat mengoreksi kelemahan sehingga masyarakat Banten keluar dari berbagai macam

jalan buntu. Terutama dalam ketidak seimbangan antara perempuan dan laki-laki dalam semua lini kehidupan.

- c. *Verhaltungswissen* yaitu memahami hukum, norma, tata tertib, dan peraturan yang menuntun semua tingkah laku politik. Sehingga subjek menjadi lebih cermat lebih bijaksana dalam menanggapi situais kondisi politik. Dalam hal ini, BPPMD berharap caleg-caleg perempuan ini untuk menjunjung tinggi prinsip kesusilaaan. Dalam seminar-seminar yang diselenggarakan oleh BPPMD banyak menyentuh sisi kesusilaan seperti contohnya agar semua caleg untuk tidak melakukan *black campaign* atau kampanye hitam dengan menyebarkan kebohongan (*hoax*).
- d. *Actionwissen* yaitu memiliki prinsip kebenaran dan keahlian yang Universal. Sanggup merefleksikan peristiwa-peristiwa politik dan membuahkan ide-ide aksi atau tindakan yang tepat untuk mengatasi semua kesulitan. BPPMD juga berharap agar caleg-caleg perempuan ini untuk memiliki wawasan yang luas dan berfikir kritis. Dalam seminar-seminarnya BPPMD selalu mengingatkan kepada caleg-caleg perempuan untuk update terhadap teknologi dan isu-isu sosial politik terkini.

Nazsir dan Sunny (2005:16) mengungkapkan, bahwasanya pendidikan politik dijalankan melalui bermacam-macam lembaga antara lain: keluarga, sekolah, kelompok pergaulan, atau lingkungan, pekerjaan, partai politik dan media massa. Dalam penelitian ini pendidikan politik dilaksanakan oleh suatu lembaga, yaitu lembaga pemerintah. Sebagai lembaga pemerintah, BPPMD meyakini bahwa pendidikan politik bagi caleg perempuan adalah penting sebagai salah satu tujuan dari pembangunan Nasional. Pembangunan Nasional pada dasarnya merupakan usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan Nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan dan peluang perkembangan global. Kualitas hidup sumber daya manusia yang makin baik gilirannya akan mampu mempercepat proses pembangunan dan seterusnya meningkatkan kualitas hidup manusia. Dengan demikian, dalam pelaksanaan pembangunan, sumber daya manusia akan berperan sebagai subjek dan sekaligus objek pembangunan. Pembangunan nasional tidak akan terwujud tanpa adanya partisipasi aktif segenap komponen masyarakat. Baik laki-laki maupun perempuan.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian diperlukan untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang disoroti. Peneliti dalam melakukan penelitian ini, menggunakan metode penelitian Kualitatif. Alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif ini karena metode ini memiliki kelebihan dalam memahami suatu fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik (Moleong Metode Penelitian Kualitatif 2007 : 6)

Objek penelitian ini berfokus pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten khususnya Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP), yang terletak di Kawasan Pusat Perkantoran Provinsi Banten Jalan Syech Nawawi Al-Bantani Serang. Data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari informan kunci (*key informan*) diantaranya Kepala Bidang dan Kepala sub Bidang Bidang peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP), calon legislatif perempuan prov. Banten dan pengamat isu-isu perempuan di Provinsi Banten.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sejarah terbentuknya BPPMD

Provinsi Banten sebelumnya tidak memiliki Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang secara khusus menangani pemberdayaan perempuan. Sebelumnya yang terdapat adalah sebuah Bidang yang menangani *hanya* Pemberdayaan Perempuan., bidang ini merupakan suatu bidang kecil yang berada di bawah OPD yang bernama “Badan Masyarakat Daerah” (BMD).

Berdasarkan UU. 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang diwadahi dalam bentuk badan, kantor, inspektorat, dan rumah sakit, maka Badan Pemberdayaan Perempuan dan

Masyarakat Desa dibentuk karena masalah pemberdayaan perempuan sudah menjadi urusan wajib semua pihak. Oleh sebab itu adalah wajib bagi semua Provinsi Kabupaten, Kota, untuk membentuk Badan yang mengurus Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa (BPPMD) Provinsi Banten merupakan Badan Pemerintah yang dibentuk melalui perda no.4 th 2008 dan berdasarkan UU.41/2007 BPPMD peduli pada pemberdayaan perempuan di bidang Ekonomi, Pendidikan, Politik, Sosial, Budaya dan Lingkungan. BPPMD memberikan aksi-aksi terobosan berupa Koordinasi, Advokasi, Fasilitasi, Sosialisasi dan Evaluasi bagi perempuan di bidang ekonomi, pendidikan, politik, sosial, budaya dan lingkungan. Tentu saja langkah pemerintah ini sangat membantu perempuan-perempuan yang ingin mendapatkan Koordinasi, Advokasi, Fasilitasi, Sosialisasi dan Evaluasi dari BPPMD.

Tugas Pokok BPPMD

Provinsi Banten merupakan satu-satunya provinsi baru di Indonesia yang melaksanakan *mainstreaming of gender issues* dalam bentuk lainnya perda No.10 tahun 2005 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah. Peraturan Daerah (perda) ini ditindaklanjuti dengan dengan instruksi Gubernur Banten No. Tahun 2005 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah. Dan pengaturan Gubernur No.39 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan rencana aksi daerah pengarusutamaan gender provinsi Banten serta SK Gubernur No.4311/3537-kesra-2006 tentang percepatan pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan PUG.

BPPMD terbagi ke dalam dua bidang menjadi **Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP)**. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP) yang terdiri dari 5 Bidang; Bidang Ekonomi, Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Sosial, Budaya Lingkungan, dan **Bidang Partisipasi Politik Perempuan**.

Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP)

Bidang PKHP bergerak dan disusun berdasarkan Rencana Aksi Nasional Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (RAN-PKHP) yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia secara berkala (lima tahun sekali) dan diimplementasikan secara serempak di seluruh Indonesia. Di dalam RAN-PKHP tersebut memuat strategi PKHP yang melibatkan berbagai sektor dan tingkat pemerintahan untuk bersama-sama bekerja untuk melaksanakan RAN-PKHP tersebut sesuai tanggung jawab bidang kerja masing-masing. Dalam strategi RAN-PKHP tersebut selain mempertimbangkan peran setiap sektor/lembaga, maka peran pemerintah Nasional dan lokal juga akan dipertimbangkan sesuai dengan telah dilaksanakannya Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan dikeluarkannya Peraturan-Peraturan Pemerintah No.25/2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom. Adanya otonomi daerah akan mengubah secara signifikan kewenangan yang ditangani pemerintah Pusat dan Daerah selama ini.

Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan merupakan bagian tidak terpisahkan dari rencana pencapaian tujuan-tujuan MDG's (*Millenium Development Goals*) yang telah disepakati oleh pemerintah Indonesia. Dengan memberikan porsi lebih kepada target penduduk perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, maka pencapaian tujuan-tujuan yang tercakup dalam MDG's di Indonesia akan dapat terwujud. Salah satu upaya untuk meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan yang sudah menjadi komitmen Internasional adalah melakukan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan.

Tugas pokok PKHP adalah meningkatkan kualitas manusia khususnya kualitas hidup perempuan yang salah satunya adalah meningkatkan partisipasi politik perempuan di Provinsi Banten hingga 30%. Tidak hanya berhenti di situ saja tapi bidang PKHP juga bertugas untuk membantu meloloskan perempuan ke kursi legislatif, mengadakan pembekalan, memberikan kiat-kiat untuk memenangkan pertarungan politik, serta pengawalan pasca pencalonan agar

dalam pembuatan Undang-Undang dapat menciptakan Undang-Undang yang berpihak pada kepentingan-kepentingan perempuan.

4. KESIMPULAN

Banyak ikon yang melekat pada wilayah Banten. Terkait dengan citra Banten sebagai wilayah religius dan santri. Hal ini sangat wajar melekat pada wilayah Banten karena suburnya tradisi keagamaan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat banten. Secara umum pesantren di Banten tumbuh cukup pesat (61.250 pesantren) dan hampir ada di setiap pelosok desa, dan di setiap wilayah-wilayah kecamatan dan kabupaten kota selalu ada tokoh utama kharismatik yang menjadi panutan bagi masyarakat Banten. Dengan citra tersebut tidak berarti perempuan dinomorduakan, meskipun wilayah religius, perempuan tetap diberikan kesempatan yang sama untuk menempati posisi-posisi strategis di sektor publik. Pembuktiannya adalah ketika pemilihan Gubernur Banten yang dipilih secara langsung Hj. Rt. Atut Chosiyah menjadi pemenang dalam pemilihan Kepala Daerah tahun 2006 dan menjadi gubernur pertama di Indonesia yang memenangkan pemilihan Gubernur secara langsung. Prestasi ini meruntuhkan mitos bahwa perempuan tidak memiliki hak dan akses yang sama dalam menempati posisi strategis di sektor publik. Keberadaan Gubernur perempuan di Banten tentunya telah menjadikan iklim yang kondusif bagi perempuan di Banten untuk berada di sektor publik. Ini terbukti dengan besarnya minat perempuan untuk menjadi anggota legislatif (kurang lebih 500 caleg perempuan). Tapi kesempatan ini berbenturan dengan pengalaman politik yang kurang cukup, karena rendahnya potensi rekrutmen politikus dalam parpol karena efek patriarki dan tingginya jumlah perempuan yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah di Banten. Menjadikan mereka kurang mampu berperan aktif di dunia politik.

Fenomena maraknya caleg perempuan yang mendaftar untuk menjadi anggota legislatif antara lain juga disebabkan oleh pelaksanaan pemilu yang berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya. Di samping tata cara pemilihannya yang berbeda, pemilu 2004 dan 2009 menegaskan adanya keterwakilan perempuan sebanyak 30% yang dapat dicalonkan oleh partai politik di setiap daerah pemilihan. Oleh karena salah satu prasyarat pengajuan caleg harus memenuhi kuota 30% bagi perempuan maka banyak partai politik “melamar” perempuan untuk menjadi caleg hanya karena saat itu di partainya kekurangan caleg perempuan, tanpa melihat latar belakang dan kemampuan dari perempuan itu sendiri.

Upaya **Koordinasi, Advokasi, Fasilitas, Sosialisasi dan Evaluasi** yang dilakukan BPPMD dalam meningkatkan kualitas caleg perempuan di lembaga legislatif dan peningkatan peran dan posisi perempuan di lembaga Eksekutif bukanlah pekerjaan yang mudah dan dapat dilakukan dalam waktu singkat, akan tetapi merupakan proses yang panjang dan berkelanjutan. Upaya inipun menjadi tanggung jawab semua pihak, baik Pemerintah, Partai Politik, Lembaga Swadaya Pemerintah (LSM), Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan. BPPMD sangat mengupayakan agar terdapat dana dari Anggaran Belanja Negara yang dialokasikan untuk peningkatan kualitas hidup perempuan (*Gender budgeting*). Namun demikian, tetap haruslah disadari bahwa masih adanya keterbatasan dalam berbagai hal, sehingga untuk mencapai hasil yang optimal sesuai dengan sarana, prasarana, dan biaya yang tersedia bahkan untuk mencapai target dan sasaran yang terukur sangatlah sulit untuk dilakukan

Jalan sederhana menuju upaya untuk meningkatkan kualitas caleg perempuan adalah, dengan pendidikan-pendidikan atau sosialisasi-sosialisasi. Pembekalan bagi perempuan-perempuan yang berpotensi yang berniat terjun ke dunia politik. Sosialisasi ini juga menerangkan betapa perlu dan pentingnya hadirnya perempuan di arena ini, apabila kita memang akan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan masyarakat.

Perjuangan kaum perempuan untuk tampil dan mengambil bagian dalam kancah politik nasional maupun lokal, memang harus dibarengi dengan kemampuan dan keberanian, kemampuan harus mencakup banyak hal, yakni integritas intelektual, integritas kepribadian, integritas kepemimpinan dan juga integritas moral. Keberanian berarti mampu memanfaatkan peluang yang ada, dengan melibatkan diri dalam berbagai organisasi, baik itu organisasi politik,

maupun organisasi lainnya. Kaum perempuan bisa berperan di mana saja, sesuai dengan porsi dan kemampuan yang dimilikinya.

Pendidikan politik yang giat dilakukan oleh BPPMD adalah **penting** dalam meningkatkan peran dan kedudukan perempuan di ranah publik khususnya politik, meningkatkan harkat dan martabat perempuan, emningkatkan rasa percaya diri perempuan, menyalurkan aspirasi, dan kepentingan kaum perempuan, meningkatkan pengetahuan, wawasan dan pergaulan perempuan di ranah publik.

Pendidikan politik yang giat dilakukan oleh BPPMD adalah **penting** dalam mempercepat terwujudnya kesinambungan, kesetaraan, dan keadilan, meningkatkan kualitas hidup berbangsa dan bernegara di bidang politik, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dan bangsa, meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia di dunia internasional.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adelina, Shelly 2008. *Perempuan ayo berpolitik. Jadilah pemimpin*. Program Studi Kajian wanita UI
- Badan Pusat Statistik dan Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan RI 2006. *Pembangunan Manusia Berbasis Gender tahun 2006*. Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan
- Badan Pusat Statistik dan Pemerintah Provinsi Banten, 2007. *Statistik dan Analisis Gender Provinsi Banten tahun 2007*.
- Biro HUMAS, Provinsi Banten. *Banten melangkah menuju kemandirian, kemajuan, Kesejahteraan, 2005*.
- Deputi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan RI, 2006. *Perempuan dan laki-laki memang beda tapi tidak untuk dibeda-bedakan*. Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan.
- Garna, Judistira K 1999. *Metode Penelitian: Pendekatan Kualitatif* . Bandung Primaco Akademika
- Gaffar, Affan (2000) *Politik Indonesia* Yogyakarta Pustaka Pelajar.
- Kartono, Kartini (1999). *Pendidikan politik sebagai bagian pendidikan orang dewasa*. Bandung: Mandar Maju
- Malik Abdul. 2004. *Menjadi orang Banten*. Serang: Percetakan Sentrautama